

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

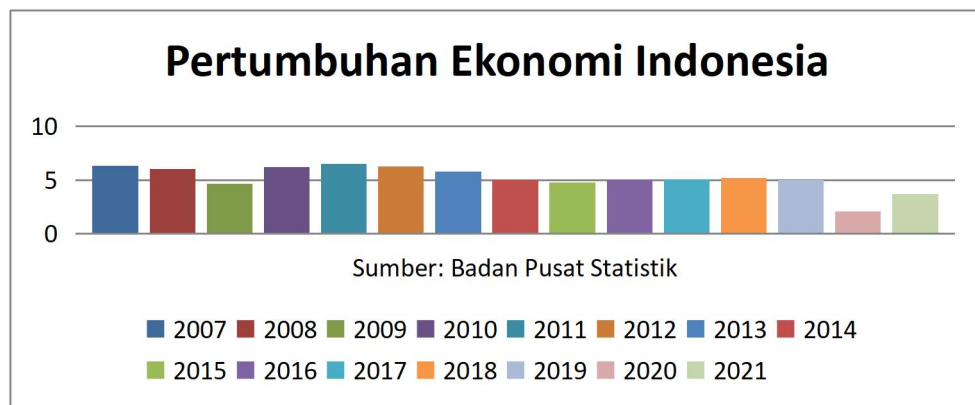
Pendapatan nasional merupakan suatu angka yang mencerminkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi disuatu negara tertentu selama satu tahun. Tolak ukur yang menjadi pusat perhatian untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian ialah pendapatan nasional, yang dalam artian tertentu nilainya tidak berbeda dengan produk nasional (Reksoprayitno, 2009:15). Dalam pendapatan nasional terdapat 2 bagian didalamnya, yakni Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto. Dimana laju kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) akan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dalam proses kenaikan output perkapita jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian dengan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi yang dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat (Sukirno, 2015:432). Suatu negara terkadang mengalami pertumbuhan yang lambat dan kadang kala mengalami pertumbuhan yang pesat, tak terkecuali bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi, karna untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan perekonomian suatu Negara harus meningkat setiap tahunnya. Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak

menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2007-2021 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bersifat fluktuasi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu menunjukkan peningkatan dan perkembangan, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007-2021:



Gambar 1 Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Tahun 2007-2021

Pada tahun 2007 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6.35%, namun terjadi penurunan ke titik 4.63% di tahun 2009. Di tahun 2010 pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Dari tahun 2011 hingga 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadinya Penurunan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mulai memburuk di tahun 2020. Bahkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi

pertumbuhan sebesar 2,07% menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi terparah selama 20 tahun terakhir akibat adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Tetapi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,6%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 karena sudah memasuki era new normal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pasang surut tersebut membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi (Nopirin, 2014:51). Menurut Nanga (2005:180), kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengendalikan tingkat bunga dan jumlah uang beredar.

Pemerintah juga menggunakan kebijakan Fiskal untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi dan berperan dalam menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi, sehingga tidak terjadi laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah (Rahayu, 2010:2)

Krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia terjadi karena tidak stabilnya tingkat inflasi menyebabkan perekonomian tidak stabil. Sehingga pada 1 Juli 2005, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF).

ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga (BI Rate) sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional. Selain itu, salah satu bentuk koordinasi kebijakan antara BI dan Pemerintah dalam pengendalian adalah pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat nasional pada tahun 2005.

Dengan berjalannya waktu, ternyata penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Krisis keuangan global tahun 2008 telah memberikan pelajaran dan kesempatan bagi bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter yang berkoordinasi dengan Pemerintah sebagai otoritas fiskal dan sektor riil dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasca krisis keuangan global 2008, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka kebijakan moneter ITF, dimana hasil penguatan tersebut berkembang menjadi bauran kebijakan (policy mix), sebagai upaya pengendalian inflasi yang diikuti dengan kemampuan mempertimbangkan indikator-indikator stabilitas pasar keuangan. Tak lepas dari permasalahan perekonomian, terdapat wabah Covid-19 yang mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara termasuk Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN

yang diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan/pengendalian Covid-19, perlindungan sosial (social safety net) dan insentif dunia usaha. Kemenkeu juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung Pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Disamping itu, pemberian insentif/fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang terdampak Covid-19. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional (Nainggolan, 2020).

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sering terjadi perdebatan, dimana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target menjaga stabilitas harga, sementara kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan koordinasi yang baik akan memberikan hasil yang positif dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia selaku otoritas moneter, menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu instrumen untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil. Selain tingkat suku bunga, instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah pengaturan jumlah uang beredar (JUB) dengan meningkatnya JUB diharapkan mampu mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat. Sedangkan pemerintah merupakan instrument dari kebijakan fiskal dengan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2007-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007-2021 baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007-2021 baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007-2021 baik secara simultan maupun parsial.